

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang

Krisis kepemimpinan selama ini selalu saja menjadi permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Krisis kepemimpinan muncul salah satunya akibat dari sedikit sekali pemimpin atau pejabat publik yang dirasa benar-benar mewakili aspirasi rakyat banyak. Penilaian masyarakat terhadap krisis kepercayaan ini diarahkan kepada pejabat publik karena mereka dianggap sebagai pemimpin dan pengatur dari sebuah wilayah.

Etika komunikasi pejabat publik di ruang publik perlu diperhatikan kembali, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri makna tentang ungkapan-ungkapan Menteri Koordinator Bidang Kamaritiman dan Investasi saat di undang oleh program Mata Najwa stasiun televisi Trans 7, kemudian tayangan tersebut juga di upload ke Channel Youtube Narasi Newsroom hingga ditonton 253,532 views. Tema yang diusung oleh Mata Najwa adalah Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk, pada Rabu 23 September 2020. Dalam video tersebut tampak Najwa mencecar Luhut Binsar Pandjaitan, yang juga dapat tugas oleh Presiden Jokowi menangani Covid-19 di Sembilan provinsi Indonesia (Pratiwi, 2020). Luhut mulai terpancing pada menit 21: 15, yang bertanya terkait hal yang disinggung oleh Luhut terkait ada yang ribut-ribut soal politik. Kemudian Najwa minta penjelasan lebih lanjut, namun respon dari Luhut mengatakan “Najwa ngga usah ngadu-ngadu”. Mulai dari point pertanyaan sensitif tersebut, Luhut lepas control terkait ucapannya yang sudah mulai tinggi (emosi).



Seharusnya pejabat publik, meskipun dia tidak setuju dengan pertanyaan tersebut bisa menjawab dengan tenang, tidak lantas ikut emosi dan seperti mencecar kembali host nya. Pejabat publik merupakan mereka yang ditunjuk dan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada sebuah badan atau instansi. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada mereka, tetapi pejabat publik juga memiliki tanggung jawab moral dalam memimpin masyarakat serta memberikan kepercayaan terhadap mereka. Apabila kita lihat fenomena yang terjadi saat ini, banyak sekali isu dan kasus negatif yang menjerat para pejabat publik sehingga menjadikan turunnya kepercayaan dari masyarakat. Banyaknya ditemukan penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, nepotisme dan lingkungan aparatur negara yang belum bersih sehingga seringkali dirasa merusak wibawa dan kredibilitas seorang pejabat publik.



Berbagai fenomena yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai masih seringnya terjadi pelanggaran etika dikalangan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan jabatan mereka. Etika seharusnya menjadi sebuah norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat baik terkait dengan sifat baik dan buruk baik dalam bersikap maupun berbicara (berkomunikasi). Saat berbicara di telepon, dan kapan tertulis. Etika berbicara dibangun dengan memperhatikan sikap dan pilihan kata. Pilihan dari kata-kata ditentukan oleh unsur-unsur komunikasi, yaitu penutur dan pendengar, materi pembicaraan, tempat, waktu, dan media komunikasi. Tanpa etika berbicara, publik Kesan aparatur pada suatu institusi akan buruk atau tidak menyenangkan (Suhartono, 2016).

Perkembangan teknologi telah menyediakan metode atau pola-pola baru dalam komunikasi. Konvergensi atau penyatuan media-media konvensional yang telah ada sebelumnya seperti televisi, komputer dan telepon menjadi satu media dengan adanya internet yang kemudian dikenal dengan media baru. Media online merupakan salah satu media baru yang menyajikan informasi secara cepat. Informasi yang disajikan dapat berupa berita, kebijakan dari pemerintah ataupun tanggapan dari pejabat publik terhadap setiap kebijakan baru yang dikeluarkan. Tanggapan dari pejabat publik seringkali menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak etis untuk disampaikan oleh para pejabat publik. Sebagaimana contoh seorang Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan RI, merupakan salah satu contoh pejabat publik yang sering mendapat kritikan atau kecaman dari masyarakat terkait ucapannya dalam beberapa kegiatan atau kunjungan kerja (PRMN Tim, 2020). Pejabat publik lainnya yang mendapat kecaman dari masyarakat Indonesia terkait dengan ucapannya tentang penanganan covid-19 di Indonesia adalah Luhut Binsar Pandjaitan (Anwar, 2020).



Puan Maharani, Ketua DPR RI, juga tidak lepas dari kritikan masyarakat terkait dengan ucapan-ucapannya yang seringkali menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat (Indonesia, 2020). Beberapa data di atas memperlihatkan bahwa pejabat publik belum mengimplementasikan atau menerapkan secara sungguh-sungguh dan benar etika komunikasi. Bagaimanapun juga hal ini dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pejabat publik itu sendiri berkurang di mata masyarakat. Secara umum, etika berkaitan dengan nilai-nilai mengenai benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab dalam

masyarakat. Etika menuntun masyarakat untuk lebih baik dalam bertindak maupun berkomunikasi.

Penelitian tentang etika komunikasi telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Tabroni (2012) memperlihatkan pejabat publik yang memanfaatkan media massa sebagai sarana komunikasi politiknya. Bagaimanapun juga etika komunikasi politik dengan menjadikan media massa sebagai salurannya akan membawa masyarakat menjadi semakin dewasa dan semakin arif dalam berpolitik. Tanpa dibarengi dengan etika dalam proses komunikasi politik yang menggunakan ruang media massa ini, Perkembangan demokrasi akan cenderung destruktif dan tidak mendidik. Padahal jika dalam demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat, maka opini publik yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan politik, seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang baik, bermoral, beretika, dan mengedepankan kepentingan umum (Tabroni, 2012 : 114).



Seperti yang dijelaskan Lelapary (2015) komunikasi non verbal pejabat publik yang dilakukan Fransisco Lelapary bahwa dalam video program berita feature “Gebrakan Jokowi” ini didapatkan konstruksi pesan nonverbal yang ditunjukkan oleh Jokowi. Pesan non verbal terkonstruksikan untuk menguatkan citra positif Jokowi dimata masyarakat. Citra positif dibangun melalui tanda tanda non verbal yaitu dengan pakaian yang dikenakan yang menunjukkan kesederhanaan dan kewibawaan, melalui perilaku nonverbal seperti gerak tubuh, sikap badan, ekspresi wajah, keintiman, dan paralinguistik (Lelapary, 2015). Melihat fenomena saat ini, dengan mudahnya akses informasi tersebar luas, sebuah kesalahan yang

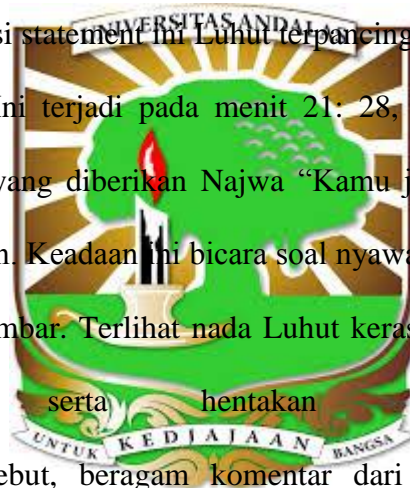
dilakukan pejabat publik menjadi rekam jejak digital yang bisa diakses di internet. Dalam penelitian sebelumnya .

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Buluamang, 2018) juga memperlihatkan perlunya seorang kepala daerah menunjukkan perilaku komunikasi yang efektif dan efisien dalam menumbuhkan citra dan ekspektasi publik yang positif. Hal ini memperlihatkan bahwa citra dan ekspektasi publik dapat menentukan bagaimana seorang kepala daerah menunjukkan perilaku komunikasi yang dapat menarik simpati dan empati publik. Adanya korelasi yang signifikan antara perilaku komunikasi kepala daerah dengan citra publik dan ekspektasi publik maka perilaku komunikasi seorang kepala daerah di hadapan publik dapat menunjukkan kualitas komunikasinya (Buluamang, 2018 : 86).

Pada penelitian ini, peneliti ingin menfokuskan kajian pada etika komunikasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan pada acara Talkshow Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk. Acara talkshow Mata Najwa merupakan salah satu nominasi penerima Anugrah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2019 (Ira, 2019). Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk telah ditonton oleh 1,9 juta.

Media sosial heboh dengan potongan video acara Mata Najwa yang menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada Rabu (23/9/2020). Berdasarkan tayangan video Mata Najwa, semula Luhut menjelaskan mengenai perkembangan penanganan Covid-19 (Asworo, 2020). Menurut dia, dirinya telah melakukan sejumlah langkah dengan mengumpulkan sejumlah pihak dari mulai menteri, gubernur, pangdam, kapolda,

korem dan lainnya. Namun pada pernyataan berikutnya Luhut pun menyindir tokoh-tokoh politik agar menahan birahi politiknya dan tidak mengumpulkan massa. “Jadi misalnya berkumpul rame-rame itu, dikontrol lah birahi kekuasaan dulu. Karena akibat dari dia itu, tau enggak ada klaster, sadar enggak kumpul rame itu. bisa kena, dan bisa mati, hanya karena birahi kekuasaan saja. Birahi politik saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini,” ujarnya. Najwa pun sempat mempertanyakan apakah yang dimaksud Luhut kumpul-kumpul ini apakah deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) baru-baru ini di Magelang. Luhut enggan menjawab secara terang. “Najwa enggak usah ngadu-ngadu”, mulai dari durasi statement ini Luhut terpancing emosi, dan menunjukkan emosi kepada Najwa. Ini terjadi pada menit 21: 28, Luhut dengan emosional mersepons pertanyaan yang diberikan Najwa “Kamu jangan sok jadi pahlawan sendiri, sok paling bersih. Keadaan ini bicara soal nyawa manusia” ungkap Luhut. Seperti ekspresi pada gambar. Terlihat nada Luhut keras, tatapan tajam ditujukan kepada Najwa serta hentakan tangan berkali-kali. Terkait fenomena tersebut, beragam komentar dari netizen pada unggahan Youtube tersebut. Seperti akun Danang Puspito mengatakan “ketika luhut tanya "apa yang sudah kau perbuat untuk negeri ini?" hello kami pembayar pajak. kami mengikuti aturan pemerintah. kami terus belajar melaksanakan kewajiban kami sebagai warga negara. sekarang gantian saya tanya tentang hak warga negara. kapan akan diberikan???”. Sementara itu netizen lain, Haidir Nasution berkomentar “Krna Najwa adalah lawan terberat dlm setiap debat, seolah2 luhut kyk siap2 untuk menghncurkan najwa atau sok2an mematahkan argument”. Ada 1.052 komentar lainnya mulai dari serius, santai dan lucu menanggapi sikap Luhut



dengan Najwa dari respon pertanyaan Najwa yang memancing emosi. Najwa sampai berkedip-kedip dan mengalihkan mata saat Luhut marah-marah, dan hanya mendengarkan saja.

Penelitian ini akan menganalisis komunikasi non verbal pejabat publik Luhut Binsar Pandjaitan, saat emosi menjawab pertanyaan presenter, dan bernada kasar. Luhut mulai emosi dan berbicara dengan bahasa tegas kepada Najwa Shihab karena pertanyaan yang sensitif dapat merugikan Luhut. Namun cecaran dari Najwa Shihab ini ramai diperbincangkan di media sosial lewat potongan-potongan video dengan narasi Najwa cecar Luhut. Berikut percakapan yang menegangkan antara Luhut dengan Najwa, "Mohon direnungkan, saya sudah katakan tadi Najwa, kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis semacam ini," ucap Luhut. "Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih!" sambung Luhut tegas. Dia melanjutkan, keadaan sekarang ini berbicara soal nyawa manusia sehingga harus memiliki tanggung jawab moral bagi bangsa Indonesia (Garjito, Dany, Mulyono, 2020).



Perbincangan panas itu pun sudah ditonton hingga 76,7 ribu kali serta mendapat ratusan komentar dari warganet dalam rilis yang dikeluarkan oleh suara.com. Dalam tayangan ekspresi Luhut tegas, pandangan mata tajam kepada Najwa hingga suara Najwa bergetar saat merespon pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh Luhut. Permasalahan yang paling signifikan Luhut dalam menyampaikan informasi, lupa diri bahwa dirinya hadir sebagai pejabat publik. Seharusnya Luhut perlu menjaga etika setiap bahasa yang dilontarkan di media. Karena rekaman video apabila tersebar di internet

menjadi jejak digital, orang akan menilai Luhut sebagai pejabat yang tidak punya etika di media.

Urgensi dari penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran, menganalisa etika komunikasi non verbal pejabat publik Luhut yang viral di media sosial, dikomentari pada akun Youtube oleh warganet. Sebagai bagian perpanjangan tangan dari pemerintah, Luhut harusnya menjaga perasaan masyarakat, pihak media, pewawancara yang telah mengundang. Jika semakin banyak hadirnya Luhut lainnya, dapat melunturkan kredibilitas Luhut sebagai pejabat dan pemerintah secara umum. Akibatnya masyarakat tidak percaya dengan informasi yang disampaikan oleh Menteri atau pun pejabat yang memberikan informasi. Penelitian ini bertujuan, memberikan gambaran tentang komunikasi non verbal Luhut sebagai pelajaran, sehingga tidak terulang kembali oleh Menteri berikutnya atau pejabat publik di daerah maupun nasional. Urgensi penelitian ini dikaji dalam semiotika Roland Barthes, adalah untuk mencari makna dari ungkapan-ungkapan yang dilontarkan oleh Luhut, apakah terkait etika komunikasi di media massa pantas atau tidak. Peneliti menganalisis dengan analisis semiotika Roland Barthes untuk menganalisis media berdasarkan asumsi bahwa media dikomunikasikan melalui seperangkat tanda. Barthes memiliki tiga tahapan membongkar tanda pada media yang dianalisis yaitu; tahap denotasi, tahap konotasi dan mitos atau ideologi sebagai tahapan akhir yang merefleksikan tanda tersebut melalui sudut pandang kultur tertentu (Kusumastutie, Srie., 2004). Begitu juga menjadi urgensi sebagai peringatan kepada pejabat publik lainnya agar bersikap baik dan menjaga etika, moral di ruang publik dalam konteks komunikasi non verbal.





Semiotika merupakan suatu studi ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam suatu konteks skenario, gambar, teks, dan adegan di video menjadi sesuatu yang dapat dimaknai. Dalam hal ini tentu video yang bisa diamati adalah scene tayangan Youtube Narasi Newsroom. Kebaruan dari tulisan ini, menonjolkan kepada komunikasi non verbal yang dibangun oleh pejabat publik yang tayang di media terhadap persepsi masyarakat. Sebab hal ini berkaitan citra pejabat dalam menggunakan etika dalam berkomunikasi di hadapan publik. Sebagai pejabat publik, seharusnya menjalankan *government public relations* dengan baik. Sehingga masyarakat percaya terhadap apa pun informasi yang disampaikan pejabat dalam berbagai hal. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pejabat dalam menjaga etika, dan menjalankan *government public relations* sebagai strategi menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan ke publik.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimana Etika Komunikasi Pejabat Publik Luhut Binsar Pandjaitan Dalam Menyampaikan Informasi di Ruang Publik pada acara Talkshow Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Etika Komunikasi Pejabat Publik Luhut Binsar Pandjaitan dalam Menyampaikan Informasi di Ruang Publik pada acara Talkshow Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk.

2. Menjelaskan Pandangan Audience terkait Etika Komunikasi Pejabat Publik Luhut Binsar Pandjaitan dalam Menyampaikan Informasi di Ruang Publik pada acara Talkshow Mata Najwa episode Gerabak Gerubuk Urus Pagebluk.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Akademis

1. Sebagai bahan kajian dalam ilmu komunikasi, peneliti berikutnya dapat memperkaya topik kajian ilmu komunikasi bidang etika komunikasi. Memberikan gambaran tentang studi Analisis Semiotika, khususnya dalam bidang *Government Public Relations*, Komunikasi Politik dan Komunikasi non verbal.



### 1.4.2 Praktis

1. Menjadi bahan informasi oleh masyarakat untuk mengevaluasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh pejabat publik.
2. Sebagai acuan bagi pejabat publik yang tampil di ruang publik, menggunakan etika komunikasi yang baik.
3. Meningkatkan pemahaman tentang analisis semiotika yang berkaitan dengan etika komunikasi